

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator

kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2022-2026. Dimana RPJMD terdapat 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan, 11 (sebelas) sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2:
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	4	Sangat Tinggi = 2 Tinggi = 2
2.	Misi 2	1	2	4	Sangat Tinggi = 3 Tinggi = 1
3.	Misi 3	1	2	4	Sangat Tinggi = 4
4.	Misi 4	1	3	5	Sangat Tinggi = 3 Sedang = 1 Rendah = 1
5.	Misi 5	2	2	4	Sangat Tinggi = 4
6.	Misi 6	1	1	4	Sangat Tinggi = 3 Tinggi = 1

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (CC)	53,3	83,28%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50	78,00	107,58%
		2	Nilai Sakip Daerah	65,00 (B)	61,02 (B)	93,88%
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,015 (perlu perbaikan)	65,027 (perlu perbaikan)	90,29%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,336	0,345	102,67%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,6650 (Berkembang)	0,6953 (Berkembang)	104,55%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,33	1,98	84,98%
		2	Tingkat Kemiskinan	10,54	12,27	116,41%
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	68,60	71,13%	103,68%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	54,19	63,08%	116,41 %
		2	Indeks Kesehatan	68,81	81,95%	119,09%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.450.000	9.830.000	104,02%
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,27 – 7,03	3,67%	69,64%
		2	PDRB/Kapita	53,50	56,57%	105,74%
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	27,00	27,09%	100,33%
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59	3,39%	60,64%
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00	13,25%	94,64%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44,00	79	179,55%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,7000	0,7592	108,46%
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	65,15	76,87	117,98%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	115	237	206,08%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,80 (cukup baik)	64,25 % sedang	99,15%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	54,00	51,18	94,78
		2	Indeks Kualitas Udara	85,49	90,71	106,11
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,06	37,76	83,79

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 18 (delapan belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah

Tujuan strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Seluruh Perangkat Daerah. Hasil pengukuran perwujudan reformasi birokrasi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00 (CC)	55,65 (CC)	101,18 %	64,00 (CC)	53,3 (CC)	83,28%
Rata-rata Capaian Kinerja				101,18%	Rata-rata Capaian Kinerja		83,28%

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar lebih baik. Capaian indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 adalah 55,25 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 hanya sebesar 53,3%, ini menunjukkan adanya penurunan capaian sebesar 1,95%, hal ini disebabkan karena masih banyak indikator penilaian yang belum tercapai atau masih kurang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Membangun unit kerja zona integritas
2. Melakukan langkah strategis untuk bisa mendorong peningkatan tata kelola pengadaan
3. Melakukan penyusunan Rencana Aksi SPAMLAPOR
4. Melakukan penyusunan Rencana Aksi terkait pengentasan kemiskinan
5. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh UPP, dan
6. Perbaikan terhadap komponen-komponen yang menjadi dasar terhadap survei penilaian integritas.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	75,13	107,32	72,50	78,00	107,59%
2	Nilai Sakip Daerah	60,00 (B)	60,49 (B)	100,81%	65,00 (B)	61,02 (B)	93,88%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65,323 Perlu Perbaikan	71,196 Perlu Perbaikan	108,99	72,015 Baik	65,027 Perlu Perbaikan	90,29%
Rata-rata Capaian Kinerja				105,71%	Rata-rata Capaian Kinerja		97,24%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 78,00% jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2022 yakni 75,13%, maka terjadi kenaikan sebesar 2,87 hal ini disebabkan terdapatnya tiga unsur layanan yang menunjukkan penilaian Sangat Baik dan Baik yakni unsur pelayanan kewajaran tarif/biaya, unsur kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan dan unsur perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

Kualitas layanan pada seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah masih perlu di tingkatkan khususnya pada enam indikator kualitas layanan yang masih belum optimal diantaranya kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, waktu pelayanan, kesesuaian jenis layanan, kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat adalah :

1. Perlunya dilakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah Pelaksana Layanan.
2. Peran aktif dalam hal informasi terhadap Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat.
3. Perlunya inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
4. Perbaikan pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan melalui aplikasi dan peningkatan inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan/ ide-ide kreatif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

2. Nilai Sakip Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melihat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2022 sebesar 60,49% dengan predikat "B" terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 60,21 dengan predikat "B". Sedangkan Tahun 2023 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan nilai 61,02 dengan predikat "B".

Tabel 3.5.1
Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Tahun 2022 (awal RPJMD)	Tahun 2023
-----------	------------	-----------------------------	----------------------------	------------

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	CC 58,02	B 60,21	B 60,49	B 61,02
---	-------------	------------	------------	------------

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai SAKIP tersebut, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan demi meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun upaya yang akan dilakukan, antara lain :

1. Memperbaiki penyusunan pohon kinerja dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan.
3. Menyempurnakan IKU pada sebagian Perangkat Daerah dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja dan memastikan formulasi perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja.
4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja.
5. Melakukan monitoring rencana aksi secara berkala
6. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada PermenPANRB No.88 Tahun 2021.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:

- a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
- b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan;
- c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).

2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:

- a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
- b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;

4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.
5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 65,027 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yakni 71,196 yang mana realisasi ini masih perlu perbaikan, jika dilihat dari realisasi capaian maka terjadi penurunan sebesar 6,169. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah kedepan guna menaikkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya akan diberikan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Faktor yang dilakukan guna peningkatan pencapaian terhadap indikator pada tahun akan datang adalah :

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah

3. Adanya upaya seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dari sektor pengawasan, inspektorat berperan penting dalam hal pemeriksaan laporan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menghambat peningkatan capaian terhadap indikator tersebut disebabkan masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang dilakukan di tahun akan datang adalah :

1. Akan menindaklanjuti kelemahan pada sistem pengendalian intern
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tujuan strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **"Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**". Tujuan ini didukung secara terpadu oleh Dinas PUTR, Dinas PMD, Distan KP, DPK, DLH, BPBD, Disdikpora dan Dinkes. Untuk mengukur tujuan kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran pada Tahun 2023. Hasil pengukuran peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Gini	0,343	0,350	102,64%	0,336	0,345	102,68%
Rata-rata Capaian Kinerja				102,64%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,68%

Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada pada ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar pada tahun 2023 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,345, menurun 0,05 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar, 0,350. Ketimpangan pendapatan/pengeluaran yang direfleksikan dengan angka Gini Ratio untuk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 0,345 dan termasuk ketimpangan sedang. Artinya semakin mendekati "Satu" maka dikatakan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna, sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Perhitungan indeks Gini pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih melalui pendekatan pengeluaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi yang didapat disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mempublikasikan penghasilannya.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **104,56%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	0,6300 (Berkembang)	0,6670	105,87%	0,6650 (Berkembang)	0,6953	104,56
Rata-rata Capaian Kinerja				105,87%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,56%

Realisasi capaian Indeks Desa Membangun pada Tahun 2023 sebesar 0,6953% terjadi peningkatan bila dilihat dari target yang ditentukan sebesar 0,6650% dengan sebutan “berkembang”, jika dibandingkan dengan target capaian pada Tahun 2022, Indeks Desa Membangun sebesar 0,6670% dengan sebutan “berkembang”.

Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun melibatkan beberapa Perangkat Daerah, Adapun upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian peningkatan Indeks Desa Membangun adalah :

1. Identifikasi IDM yang akan menaikkan indeks
2. Memetakan hasil identifikasi yang akan dinaikkan indeksnya agar rekomendasi dapat dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan lokal desa
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait setelah hasil pemetaan didapatkan dengan tujuan agar Perangkat daerah dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Multi Stakeholder (Tenaga Ahli, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di Perangkat Daerah dan Desa.

Peningkatan status desa pada tahun 2023 diketahui terjadi peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Status Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 sudah tidak ada
2. Status Desa Tertinggal pada tahun 2022 sebanyak 12 desa, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 9 desa
3. Status Desa Berkembang pada tahun 2023 sebesar 42 desa, pada tahun 2022 jumlah desa berkembang sebanyak 44 desa, terjadi penurunan disebabkan terdapat beberapa desa yang meningkat statusnya, dari tertinggal ke berkembang dan ada juga desa berkembang yang meningkat statusnya menjadi desa maju.
4. Status Desa Maju pada tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan sebagian besar desa yang berstatus maju pada tahun 2022 meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri di tahun 2023.

5. Status Desa Mandiri pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 14 Desa, hal ini disebabkan adanya program gerbangsari.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **100,69%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	11,34	12,24	107,93%	10,54	12,27	116,41%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,38	1,49	62,61%	2,33	1,98	84,97%
Rata-rata Capaian Kinerja				85,27%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,69%

1. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data statistik, Presentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 12,27%, terjadi kenaikan sebesar 0,03% poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 12,24%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 16,89 ribu jiwa, bertambah sebanyak 150 jiwa dari tahun 2022.

Jika dilihat dari target awal RPJMD maka persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dengan target awal sebesar 11,34. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah :

1. Setiap tahun dilakukan update data keluarga miskin agar penanganan kemiskinan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
2. Melalui Dinas Sosial dilakukan beberapa kegiatan antara lain :
 - Pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/ jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu.
 - Program nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
 - Program keluarga Harapan (PKH)
 - Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT Bantuan Pangan Non Tunai
 - Bantuan Langsung Tunai - Bahan Bakar Minyak (BLT - BBM)
3. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan bantuan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sampai dengan tahun 2023 sudah tertangani sebanyak 3.450 unit.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memberikan bantuan Peralatan yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa bantuan Pengadaan perlengkapan/aksesoris rias pengantin sebanyak 130 unit, Pengadaan rental komputer sebanyak 4 unit, Pengadaan pertukangan sebanyak 18 unit, Pengadaan perbengkelan sebanyak 10 unit, Pengadaan air kemasan 2 layer sebanyak 1 unit, Pengadaan mesin-mesin parut kelapa komplit sebanyak 2 unit.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, biasanya hal tersebut didapatkan pada masyarakat khususnya lulusan baru perguruan tinggi.

Realisasi indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 adalah sebesar 1,98 persen terjadi kenaikan sebesar 0,49 persen jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 1,49 persen.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka adalah :

1. Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan
2. Minimnya pengalaman dari pencari kerja
3. Perubahan Industri
4. Kondisi ekonomi yang terjadi, dan
5. Isu diskriminasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran terbuka diantaranya sebagai berikut :

1. Menambah keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas PMPTSPK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan di BLK seperti pelatihan keterampilan menjahit, pertukangan, perbengkelan, dll.
2. Membuka lapangan usaha sendiri, pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian izin usaha.
3. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi UKM memberikan bantuan dana melalui Koperasi dalam membangun usaha mandiri dengan angsuran yang lebih ringan.

Tujuan Strategis 3

Meningkatkan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusi

Tujuan strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Untuk mengukur tujuan ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2023 adalah sebesar **103,69%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil pengukuran peningkatan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,19	68,35	100,23	68,60	71,13	103,69
Rata-rata Capaian Kinerja				100,23%	Rata-rata Capaian Kinerja		103,69%

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 mencapai 71,13 naik 0,59 poin atau 0,87 % di bandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 67,76 selama 2021 sampai 2022. IPM Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata tumbuh sebesar 0,88 % setiap tahunnya. Peningkatan IPM 2023 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya, baik

kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2023 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 12,69 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma 1. Angka ini meningkat 0,08 % dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,69 tahun. Sementara, rata-rata lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,26 % dari 8,09 tahun menjadi 8,35 tahun pada tahun 2023.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bagi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,27 tahun atau lebih lama 0,30 persen dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **100,19%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan	52,55%	62,16%	118,29%	54,19%	63,08%	116,41%

2	Indeks Kesehatan	68,64%	75,09%	109,39%	81,95%	68,81%	83,96%
Rata-rata Capaian Kinerja				113,84%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,19%

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM.

Berdasarkan data statistik, Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 63,08% terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan indeks pendidikan tahun 2022 yang hanya sebesar 62,16%.

Beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan adalah :

1. Memberikan motivasi dan dorongan bagi orangtua dan siswa akan pentingnya pendidikan dasar 9 tahun.
2. Dari segi tenaga pengajar (guru) di tunjang dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
3. Memberikan peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi pendidikan bagi tenaga pendidik.
4. Pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga siswa sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan hidup lebih tenang tanpa ada gangguan.
5. Dari segi kesehatan diperlukan partisipasi tenaga medis dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa.

2. Indeks Kesehatan

Realisasi indikator kinerja terhadap indeks kesehatan tahun 2023 sebesar 68,81%, menurun 6,28%, jika dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 75,09%. Jika Indeks Kesehatan Masyarakat menurun beberapa persen dari target yang telah ditentukan maka derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu perhatian khusus. Hal ini menjadi tugas Dinas Kesehatan untuk perbaikan peningkatan pada tahun akan datang.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal peningkatan capaian dan realisasi kegiatan di bidang kesehatan antara lain:

1. Menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya pemeliharaan kesehatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang maksimal.
4. Membentuk Kader disetiap Desa untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan

Adapun faktor – faktor yang menghambat pencapaian indeks kesehatan antara lain ;

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar Yang terdiri dari Kecamatan Kepulauan, sehingga ada beberapa daerah kepulauan yang sangat sulit di jangkau.
2. Masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah kepulauan yang susah terjangkau.
3. Keterbatasan Anggaran
4. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, . Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **104,02%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi** Hasil pengukuran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	9.200.000	9.446.000	102,67	9.450.000	9.830.000	104,02
Rata-rata Capaian Kinerja				102,67%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,02%

1. Pengeluaran Perkapita yang disetarakan

Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita yang disetarakan mencapai 9.830.000 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 384.000 atau 1,35 %. Dengan rata-rata capaian pada tahun 2023 yakni 104,02%. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata rumah tangga yang ada di Kepulauan Selayar meningkat.

Pengeluaran Rumah tangga memberi sumbangsi besar dalam peningkatan pengeluaran perkapita. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Tujuan Strategis 4

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman

Tujuan strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2022 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2023 adalah sebesar **83,33%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi kemaritiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4,61%-6,14%	3,67%	69,69%	5,27 – 7,03	3,67%	60,92%
2	PDRB /kapita	49,83 Juta	53,76 juta	107,88%	53,50	56,57%	105,74%
Rata-rata Capaian Kinerja				88,79%	Rata-rata Capaian Kinerja		83,33%

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 3,67 % tidak terjadi kenaikan atau penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Administrasi Pemerintahan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan Makan Minum sebesar

13,53%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel. Pertumbuhan kedua dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,67% diikuti oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,50%.

Tabel 3.12.1
Perkembangan capaian Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	-1,78%	4,02%	3,67%	3,67%

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat enam lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 4 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,86 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,66 persen; Industri Pengolahan sebesar 7,23 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,19 persen; Konstruksi sebesar 4,56 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,11 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi PDRB terbesar hanya tumbuh sebesar 2,62 persen.

2. PDRB/kapita

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu

daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 56,57 juta,- sedangkan Tahun 2022 sebesar 53,76 juta,-. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun pencapaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan perkapita melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Usaha Perikanan

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **100,33%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	26,50%	27,09%	102,23%	27,00%	27,09%	100,33%
Rata-rata Capaian Kinerja				102,23%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,33%

Realisasi Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 27,09% jika dilihat realisasi tahun 2022 yakni 27,09% maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan terhadap realisasi presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan realisasi tersebut adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan melihat volume produksi perikanan tangkap sebesar 105,8% dengan kategori sangat tinggi.
2. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan dengan persentase capaian sebesar 121,55% dengan kategori sangat tinggi.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi capaian di tahun depan yaitu :

1. Meningkatkan produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap pada usaha skala kecil dan mikro.

2. Meningkatkan keberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap.
3. Perlunya pengawasan perairan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi ikan di atas kapal (transshipment) dan memaksimalkan ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan sentra dan subsentra pendaratan.
4. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan
5. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha pada aspek pengolahan dan pasar
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi pengolahan.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Usaha Pariwisata

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **60,64%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran Peningkatan usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi PAD sektor	4,76%	2,67%	56,09%	5,59%	3,39%	60,64%

	Pariwisata terhadap PAD						
Rata-rata Capaian Kinerja				56,09%	Rata-rata Capaian Kinerja		60,64%

Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD

Salah satu sumber potensial PAD adalah sektor Pariwisata, Keberadaan obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan lingkungan serta memupuk rasa cinta tanah air.

Realisasi capaian terhadap presentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2023 sebesar 3,39% terjadi kenaikan realisasi capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 2,67%. Realisasi capaian tersebut masih jauh dari target yang ditentukan.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan tempat destinasi dengan baik
2. Belum adanya bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bumdes Bontomarannu terkait pengelolaan Puncak tanadoang.
3. Akses menuju lokasi destinasi masih kurang baik
4. Fasilitas daya tarik wisata masih kurang baik
5. Masyarakat kurang aktif dalam membantu pengembangan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adapun upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata
2. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya.

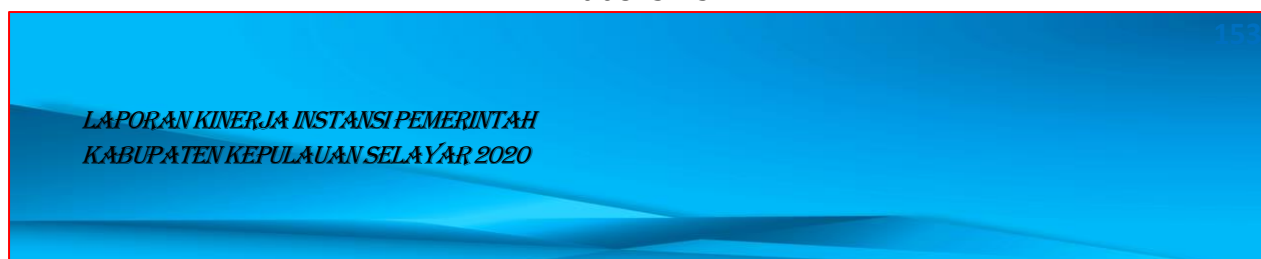
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan
4. Pengembangan pariwisata pada masyarakat khususnya yang berada dekat dengan lokasi tempat rekreasi.
5. Mengembangkan Daya tarik dan destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Meningkatkan pemasaran pariwisata, dan
7. Mengembangkan SDM dan Ekonomi kreatif.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **94,64%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha industri, transportasi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15



Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	13,50%	1,21%	8,96%	14%	13,25	94,64%
Rata-rata Capaian Kinerja				8,96%	Rata-rata Capaian Kinerja		94,64%

Realisasi terhadap indikator presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 13,25 persen, Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yakni 1,21% maka terjadi kenaikan terhadap realisasi tahun 2023.

Peningkatan sektor transportasi disebabkan adanya perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada pelayanan parkir ditepi jalan dan kawasan kuliner, penyediaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan serta layanan perizinan seperti penerbitan rekomendasi penutupan jalan dan rekomendasi pemuatan BBM untuk kapal laut motor yang menuju kewilayah kepulauan serta layanan sarana dan prasarana seperti pada terminal benteng dan fasilitas darat pada pelabuhan pematata.

Untuk meningkatkan sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya investasi. Dengan dilakukannya investasi pada sektor perdagangan maka diharapkan sektor perdagangan dapat berkembang lebih baik lagi di masa akan datang.

Faktor penyebab sehingga tidak tercapainya target dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Belum tersebarnya investasi pada master plan pengemban investasi di kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Sektor /lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan.
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian LKPM yang bersifat memaksa.

Beberapa solusi dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Penyusunan dokumen investment Project Ready to Offer sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) sehingga layak untuk dipasarkan kepada investor terutama investor dari Luar Negeri.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM, Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan.
3. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang terlibat dalam penyiapan investasi terutama dengan instansi seperti Pajak, PLN dan regulasi yang mendorong untuk menyapaikn LKPM.

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya

Tujuan strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil pengukuran peningkatan aktualisasi nilai budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40	proses	proses	44	79	179,55%
Rata-rata Capaian Kinerja				proses	Rata-rata Capaian Kinerja		179,55%

Realisasi terhadap indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 sebesar 79%, terjadi peningkatan jika dilihat dari capaian realisasi tahun 2022 dimana masih tahap proses perhitungan oleh Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kepulauan selayar.

Kekayaan budaya Indonesia sesungguhnya luar biasa, namun sayang belum terkelola dengan baik, begitu pula dengan kekayaan budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan diperlukan :

1. Pembinaan warisan budaya benda dan tan benda agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diperlukan pengawasan cagar alam dan cagar budaya.
3. Pemeliharaan cagar budaya agar tetap terjaga keasliannya.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur tujuan kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **108,46%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Sosial	0,6900	0,7384	117,20	0,7000	0,7592	108,46
Rata-rata Capaian Kinerja				117,20 %	Rata-rata Capaian Kinerja		108,46%

Realisasi indeks ketahanan sosial pada tahun 2023 sebesar 0,7592 terjadi peningkatan terhadap target yang ditentukan 0,7000 dengan capaian 108,46 persen, jika dilihat dari realisasi terjadi kenaikan dibanding tahun lalu sedangkan capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan target yang ditentukan pada tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya. Kenaikan indeks ketahanan sosial dipengaruhi oleh beberapa dimensi diantaranya dimensi modal sosial, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial yaitu :

1. Toleransi tinggi terhadap suku, ras dan agama.
2. Aman dalam beribadah.
3. Terpenuhinya kebutuhan dari sandang, pangan dan papan.
4. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, PKM ataupun Pustu.
5. Keinginan masyarakat untuk berobat di layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, PKM maupun Pustu.
6. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berobat dengan layanan jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah menyediakan sekolah baik tingkat dasar dan menengah, mulai dari kecamatan daratan yang dapat dijangkau hingga kecamatan kepulauan yang sulit dijangkau.
8. Pemerintah memudahkan perizinan pembukaan lembaga pendidikan non formal, seperti pusat bimbingan belajar, les bahasa inggris dan lainnya.

Tujuan Strategis 6

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan keagamaan

Tujuan strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Untuk mengukur tujuan keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **117,99%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	63,00	77,55	123,09	65,15	76,87	117,99
Rata-rata Capaian Kinerja				123,09%	Rata-rata Capaian Kinerja		117,99%

Indeks Kesalehan Sosial

Hasil perhitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 76,87 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,68 poin.

Terdapat 5 dimensi pembentuk IKS yaitu :

1. Solidaritas Sosial = 64%
2. Kerjasama/ mutualitas = 63,40%
3. Toleransi = 89,85%
4. Keadilan = 81,75%
5. Ketertiban Umum (stabilitas) = 85,24

Secara umum, tingkat Kesalehan Sosial masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik berdasarkan skor atau nilai pada masing-masing dimensi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu di tingkatkan yaitu dimensi solidaritas sosial dan kerjasama/mutualitas.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial adalah :

1. Memaksimalkan program/ kegiatan seperti program sikamaseang (satu menanggung satu), fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat, program berbagi berbasis lingkungan setempat dan program sedekah jumat untuk meningkatkan dimensi sosial dan kerjasama.
2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam menjaga dan mengembangkan kerifan lokal masyarakat selayar, seperti annyorong lopi, angngangka sapo, akrera, aklampareng dan akmuhakka.
3. Mendorong dan memberdayakan lembaga keagamaan seperti, masjid, musholah, majelis taklim, dll untuk menjadi pusat pembinaan kesalehan sosial.
4. Meningkatkan kualitas data dan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan kesalehan sosial di daerah, serta mengidentifikasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Damkar. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **206,08%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kriminalitas	130 kasus	203 kasus	156,15%	115 kasus	237 kasus	206,08%
Rata-rata Capaian Kinerja				156,15%	Rata-rata Capaian Kinerja		206,08%

Realisasi capaian pada tahun 2022 terhadap kasus kriminalitas adalah sebanyak 203 kasus, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus kriminalitas meningkat menjadi 237 kasus, berdasarkan jumlah tersebut perilaku kriminalitas yang paling banyak adalah pencurian biasa. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, selain itu pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar hukum, baik pelanggaran berat maupun ringan.

Upaya yang dilakukan agar tindak kriminalitas berkurang/diminimalisir yaitu :

1. Melakukan trantibum secara rutin
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan trantibum
3. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan poskamling/ronda

Tabel 3.19.1
Angka Kriminalitas Tahun 2021-2022
Data Angka Kriminal

No	JENIS KEJAHATAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Narkoba	12	14	11
2	Pengrusakan	3	9	9
3	Penyerobotan Tanah	4	7	5
4	Senjata Tajam	1	1	8
5	Penodongan	0	0	0
6	Minuman Keras	1	1	5
7	Perkelahian	0	0	0
8	Pemerasan	2	0	0
9	Penculikan	0	0	0
10	Curanmor	0	7	3
11	Pencurian Ternak	0	1	0
12	Pencurian Berat	0	0	1
13	Pencurian Biasa	41	61	77
14	Penganiayaan	38	56	64
15	Penipuan	16	20	35
16	Pembakaran	1	1	0
17	Pengeroyokan	3	7	5
18	Kesusilaan	3	0	0
19	Pencabulan	3	8	9
20	Perjudian	6	5	3
21	Pemeriksaan	4	1	1
22	Penyalahgunaan BBM	1	4	0
23	Percobaan Pemeriksaan	0	0	0

24	Senpi ilegal/rakitan	0	0	0
25	Korupsi	0	0	1
	JUMLAH	139	203	237

Tujuan Strategis 7

Meningkatkan Pelestarian lingkungan hidup

Tujuan strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur tujuan ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **156,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,46 Cukup baik	64,99	102,41	64,80 cukup baik	64,25 sedang	99,15
Rata-rata Capaian Kinerja				102,41%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,15%

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 sebesar 64,25

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2022 sebesar 64,99. Meskipun terjadi penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup daerah dari tahun sebelumnya namun kualitas lingkungan hidup di kabupaten kepulauan selayar masih tergolong baik.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah antara lain :

1. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli air.
2. Melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL dan USK.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis.
6. Meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 11

Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2023 adalah sebesar **94,89%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air	52,00	55,56	106,85	54,00	51,18	94,78
2	Indeks Kualitas Udara	85,39	88,73	103,91	85,49	90,71	106,11
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,57	37,29	87,60	45,06	37,76	83,79
Rata-rata Capaian Kinerja				99,45%	Rata-rata Capaian Kinerja		94,89%

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air pada Tahun 2023 berada pada angka 51,18 dari target yang direncanakan sebesar 54,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,78%, terjadi penurunan sebesar 4,38% jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 55,56. Indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan IKA tingkat provinsi dan pusat maka IKA Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam kategori Cukup Baik.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
- b. Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.

- c. Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
- d. Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
- e. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan
- f. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik dan Usaha Skala Kecil (USK).
- g. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
- h. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
- i. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
- j. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
- k. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2023 sebesar 90,71 persen, terjadi peningkatan sebesar 1,98 % dibandingkan tahun 2022 yakni 88,73%, hal ini menunjukkan indeks kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemaran utama yaitu oksidan /ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (Co), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja

yaitu NO₂ dan SO₂.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan di tahun akan datang yaitu :

1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi
2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
 - b. Sumber bergerak:
 - Manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal
 - Kegiatan uji emisi secara berkala
 - Peningkatan biaya parkir
 - Perda terkait kendaraan bermotor
 - Pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu
 - Hari bebas kendaraan bermotor
 - c. Sumber tidak bergerak:
 - Penuaan baku mutu industri
 - Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
4. Upaya lainnya:
 - a. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
 - b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
 - d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
 - e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran kualitas udara adalah :

1. Kawasan Industri (PLTD Tangkak) yang menggunakan diesel dengan solar sebagai bahan bakar sehingga kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂.
2. Kawasan perkantoran, kandungan SO₂ lebih tinggi dari NO₂ dikarenakan tepat disamping kawasan tersebut merupakan akses keluar masuk truk ke pertambangan dengan aktivitas pengangkutan yang tinggi, juga ruas jalan di depan kawasan perkantoran juga merupakan jalur untuk kendaraan truk dan kendaraan besar lainnya.
3. Kawasan permukiman khususnya jalan sudirman, kandungan SO₂ hampir sama tinggi dengan NO₂. Hal ini dapat terjadi karena merupakan titik ramai lalu lintas dengan 5 arah lalu lintas, tanpa lampu merah dan merupakan batas kendaraan besar seperti truk untuk tidak masuk ke kota sehingga hal ini membuat lalu lintas padat sehingga terjadi peningkatan emisi gas buang kendaraan.
4. Kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂ pada kawasan transportasi khususnya terminal benteng, hal ini dikarenakan angkutan penumpang yang menggunakan solar lebih banyak dibandingkan dengan bensin dan umur kendaraan banyak di atas lima tahun.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Realisasi indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 sebesar 37,76 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 37,29. Hal ini menunjukkan indeks tutupan lahan kabupaten kepulauan selayar masih tergolong kurang baik. Untuk mencapai target pencapaian tersebut maka diperlukan inventarisasi data ruang terbuka hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKL.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan IKL dengan meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang

terbuka, juga meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan di 10 Kecamatan, yang mana pelaksanaannya dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose treespecies (MPTS).

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62.500.000	60.148.620	96,24%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	137.100.000	133.473.100	97,35%
		Nilai Sakip Daerah	3.470.000	3.470.000	100%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	144.219.965.756	141.107.194.104	97,84%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	2.937.188.500	2.360.621.135	80,37%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1.074.750.800	992.979.400	92,39%
5		Tingkat Pengangguran Terbuka	183.316.000	183.017.100	99,84%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Kemiskinan	4.000.357.000	3.986.200.600	99,65%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1.186.421.000	1.182.090.427	99,63%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	75.555.289.425	72.259.696.929	95,64%
		Indeks Kesehatan	121.425.697.160	89.461.352.342	73,68%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	1.876.710.000	1.852.684.350	98,72%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1.297.994.800	1.294.569.310	99,74%
		PDRB/Kapita	340.000.000	339.437.200	99,83%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	809.988.909	807.938.974	99,75%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1.948.283.370	1.934.480.970	99,29%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	5.354.141.300	4.374.668.848	81,71%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	100.000.000	99.765.200	99,77

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	188.897.200	176.305.673	93,33%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	521.195.000	520.608.556	99,89%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	862.664.900	845.294.449	97,99%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	6.870.356.200	6.829.865.876	99,41%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	716.689.600	713.021.300	99,49%
		Indeks Kualitas Udara	1.558.416.800	1.549.399.460	99,42%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	3.771.505.000	3.751.557.000	99,47%

1.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber daya

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) sasaran.

Tabel 3.23
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	96,24%	83,28%	-12,96%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,35%	107,58%	10,23%
		Nilai Sakip Daerah	100%	93,88%	-6,12%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	97,84%	90,29%	-7,55%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	80,37%	102,67%	22,3%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	92,39%	104,55%	12,16%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	99,84%	84,98%	-14,86%
		Tingkat Kemiskinan	99,65%	116,41%	16,76%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	99,63%	103,68%	4,05%
7		Indeks Pendidikan	95,64%	116,41%	20,77%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Kesehatan	73,68%	119,09%	45,41%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	98,72%	104,02%	5,3%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	99,74%	69,64%	30,1%
		PDRB/Kapita	99,83%	105,74%	5,91%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	99,75%	100,33	0,58%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	99,29%	60,64%	38,65%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	81,71%	94,64%	12,93%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	99,77%	179,55%	79,78%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	93,33%	108,46	15,13%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	99,89%	117,98%	18,09%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	97,99%	206,08%	108,09%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	99,41%	99,15%	-0,26%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	99,49%	94,78%	-4,71%
		Indeks Kualitas Udara	99,42%	106,11%	6,69%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	99,47%	83,79%	-15,68%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 18 (delapan belas) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 25,16%. Selain itu terdapat 7 sasaran dengan tingkat efisinsi kurang baik. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta OPD penanggung jawab.

Tabel 3.24
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah,
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah,
		Nilai Sakip Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Sekretariat Daerah,
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program pengelolaan keuangan daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 4. Program penelitian dan pengembangan daerah	Inspektorat, BPKPD, Bappelitbangda
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 2. Program pembinaan perpustakaan	Distan KP, DPK, Disdikpora, Dinkes

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1. Program Penataan Desa 2. Program peningkatan kerjasama desa 3. Program Administrasi Pemerintahan 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemerintahan dan Desa
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitasi Perekonomian Perdesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Program penempatan tenaga kerja	Disperinaker
		Tingkat Kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
6	Meningkatnya Fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2. Program penelitian dan pengembangan daerah	Bappelitbangda
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan	Disdikpora
		Indeks Kesehatan	1. Program pemenuhan upaya-upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia Kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinkes

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota 2. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 	Disdag KUKM
9	Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelaksanaan kebijakan perekonomian 2. Program pelaksanaan administrasi pembangunan 	Setda
		PDRB/kapita	Program promosi penanaman modal	Dinas PMPTSP
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengelolaan pembudidayaan ikan 	Dinas Perikanan
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. Program pengelolaan pelayaran 3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Perhubungan Dinas PMPTSP
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Disparbud
14	Meningkatnya usaha pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 2. Program pengembangan kebudayaan	Badan Kesbangpol, Dinas Pariwisata dan kebudayaan
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesbangpol
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka kriminalitas	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan damkar
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 3. Program penanganan pengaduan kegiatan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
	meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 6. Program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (Mha), kearifan lokal dan hak Mha yang terkait dengan PPLH 8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 10. Program Pengelolaan persampahan	